

Saksi Kasus Pencucian Uang Rafael Alun Mangkir dari Pemanggilan Penyidik KPK

JAKARTA (IM) - Salah satu saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo (RAT) mangkir alias tidak memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 28 Juli 2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan jika saksi tersebut yakni seorang pengusaha, Timothy Pieter Pribadhi.

"Timothy Pieter Pribadhi (wiraswasta), saksi tidak dan tanpa konfirmasi alasan ketidakhadirannya. Masih diagenda untuk pemanggilan ulang," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (31/7).

Untuk itu, KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Timothy Pieter Pribadhi dalam kapasitasnya sebagai saksi. KPK memburuhkan keterangan

Timothy untuk menuntaskan kasus Rafael Alun. Namun, belum diketahui jadwal pasti pemanggilan ulang terhadap Timothy.

KPK telah menetapkan Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan di DJP. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90 ribu Dollar Amerika Serikat atau setara Rp1,34 miliar.

Rafael menerima uang sebesar Rp1,34 miliar tersebut selama bertugas di DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan pada Ditjen Pajak Kemenkeu.

Dia diduga menerima gratifikasi melalui perusahaan jasa konsultasi perpajakan miliknya yakni, PT Artha Mega Ekadhana (PT AME). Ia disebut aktif menawarkan perusahaannya kepada wajib pajak yang mempunyai masalah perpajakan. **han**

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PENCANANGAN 10 JUTA BENDERA MERAH PUTIH

Penjabat Bupati Aceh Utara Mahyuzar (kedua kanan) berbincang dengan Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Inf Hendra Sari Nurhono (kedua kiri) saat pembagian bendera di sela pencanangan 10 juta Bendera Merah Putih di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara, Lhoksukon, Aceh Utara, Aceh, Senin (31/7). Pencanangan 10 juta Bendera Merah Putih tersebut dalam rangka menyemarakkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI dengan pembagian bendera gratis untuk masyarakat di kabupaten itu.

DPD Golkar Se-Indonesia Tolak Munaslub untuk Melengserkan Airlangga Hartarto

Sebanyak 38 ketua DPD Golkar tolak Munaslub untuk lengserkan Airlangga sebagai ketua umum. Namun Bahliil Lahadalia sebut biar DPP yang putuskan.

JAKARTA (IM) - Seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar kompak menolak wacana penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), yang akan melengserkan Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum. Sementara itu Menteri Investasi mengatakan, soal munaslub serahkan ke DPP Partai Golkar.

Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Airlangga. Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, seluruh ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Airlangga di Bali. Dalam pertemuan itu, sebanyak 38 ketua DPD menegaskan komitmen

dan taat pada keputusan munas, rapimnas, dan rakernas.

"Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," kata Doli dalam keterangan tertulis, Senin (31/7).

Doli menambahkan pertemuan 38 DPD Golkar provinsi dengan Airlangga Hartarto adalah inisiatif para ketua DPD. Hal itu dikarenakan DPD merupakan pemilik suara di munas Golkar.

"Kedua, untuk urusan pilpres sebagaimana yang

diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya," tegasnya.

Dia menambahkan DPD Golkar seluruh provinsi di Indonesia juga menyatakan memberikan mandat pada Airlangga dalam proses negosiasi, strategi, dan momentum terkait Pilpres 2024.

"Kami sudah melihat ketua umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan parpol," ujar Doli.

Sementara itu, Menteri Investasi yang juga politikus Partai Golkar, Bahliil Lahadalia mengataan, sebaiknya soal munaslub diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai Golkar.

"Nanti kita lihat ya. Serahkan itu ke DPP," ujar Bahliil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7).

"Nanti kita lihat, lewat mekanisme organisasi saja ya," tuturnya.

Sebagai informasi, terkait munaslub, posisi Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar memang sedang digoyang. Sejumlah pihak dari eksponen Partai Golkar mendorong munaslub segera diselenggarakan untuk mengganti Airlangga. Terkait Pilpres 2024, Golkar memang belum memutuskan arah dukungan. Golkar masih ngotot ingin Airlangga maju sebagai bakal capres maupun bakal calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024. **han**

Pengusaha Penyupap Kabasarnas Henri Alfiandi Serahkan Diri ke KPK

JAKARTA (IM) - Salah satu pengusaha yang menjadi tersangka penyupap Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023, Marsekal Madya (Marsdy) TNI (Purn) Henri Alfiandi (HA) menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (31/7) pagi. Tersangka tersebut yakni, Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan (MG).

Berdasarkan pantauan, Mulsunadi Gunawan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, didampingi tim kuasa hukumnya, Senin pagi.

Diketahui, Mulsunadi telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap Henri Alfiandi. Tapi, ia belum dilakukan upaya penahanan oleh KPK.

"Betul, informasi yang kami terima, hari ini satu tersangka pihak swasta atas nama MG dalam perkara dugaan suap pengadaan di Basarnas RI hadir ke KPK dengan didampingi Pengacara Juniver Girsang," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (31/7).

Tim penyidik bakal langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap Mulsunadi Gunawan. Belum diketahui apakah Mulsunadi Gunawan bakal langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, hari ini.

"Tim penyidik segera lakukan pemeriksaan dan kami pastikan, hak-hak tersangka kami penuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana para tersangka KPK lainnya," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas Tahun Anggaran 2021-2023. Kelima tersangka tersebut yakni, Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023 Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi (HA).

Kemudian, Koordinator Administrasi (Kooramin) Kepala Basarnas Letnan Kolonel Adm, Afri Budi Cahyanto (ABC); Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan (MG); Direktur Utama PT Inter-teknografi Grafika Sejati, Marilya

(MR); dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil (RA).

Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto diduga telah menerima fee atau suap sebesar Rp88,3 miliar dari para pengusaha penggarap proyek di Basarnas sejak 2021-2023. Sebagian uang suap tersebut berasal dari Mulsunadi, Marilya, dan Roni Aidil.

Adapun, proyek yang dibatalkan Henri dan Afri di tahun 2023 di antaranya, pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar; pengadaan *public safety diving equipment* dengan nilai kontrak Rp17,4 miliar; serta pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar.

KPK menyerahkan dua orang tersangka yakni Henri dan Afri kepada Puspom Mabes TNI untuk diselesaikan proses hukumnya. Sedangkan Roni Aidil dan Marilya diproses hukum oleh KPK dan sudah dilakukan penahanan. Sementara untuk tersangka Mulsunadi Gunawan (MG) belum ditahan. **han**

Anies akan Bangun Infrastruktur yang Berkeadilan, Tak Hentikan Pembangunan Tol

JAKARTA (IM) - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, memastikan dirinya tidak akan menghentikan program pembangunan jalan tol ke depannya. Namun ia menyatakan harus ada kebijakan diterapkannya unsur keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar jalan tol.

Salah satu contohnya adalah memasukkan lahan atau tanah milik masyarakat di sekitar jalan tol sebagai investasi publik dalam bentuk penyertaan modal.

"Sehingga, ketika jalan tol menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut bukan hanya lari ke orang-orang atau kantor-kantor yang ada di Jakarta, tapi juga dirasakan rakyat yang berada di sepanjang jalan tol," kata Anies, Sabtu (29/7).

Menanggapi hal ini, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikash Lembong, yang kini menjadi juru bicara sekaligus tim ahli ekonomi Anies Baswedan, menyatakan itu adalah salah satu komitmen perwujudan pembangunan yang berkeadilan ala Anies Baswedan. Ia menyebutnya sebagai visi misi pembangunan Masyarakat Pemilik Aset (Ownership Society).

"Salah satu visi ekonomi kita adalah membangun se-

buah Masyarakat Pemilik Aset atau istilahnya Ownership Society, di mana segenap warga dan rumah tangga bisa memiliki aset, dan menikmati kenaikan nilai aset tersebut," kata Tom Lembong, sapaan akrabnya, dalam keterangannya Minggu (30/7).

Dengan sebuah Ownership Society, sambung Tom, mental masyarakat juga akan berubah total, karena publik yang berorientasi pada kenaikan nilai aset, menjadi peduli dengan strategi jangka panjang. Ia merujuk pernyataan Anies Baswedan soal investasi masyarakat sekitar jalan tol dengan mekanisme penyertaan modal, akan mendorong pola pikir dan kondisi masyarakat yang mampu menuju kesejahteraan jangka panjang atau hasil panen. Berbeda, lanjutnya, dengan masyarakat kebanyakan di negara-negara maju yang secara regulasi bisa dikondisikan memiliki aset-aset dalam sebuah usaha atau bisnis. **mei**



SURVEI KELEBIHAN CALON PRESIDEN
Peneliti senior LSI Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas (kanan) didampingi Lana Maulana (kiri) menyampaikan analisis temuan dan Survei Nasional bertajuk Melebarnya Jarak Elektabilitas Prabowo dengan Ganjar di Jakarta, Senin (31/7). Hasil survei tersebut menyebutkan elektabilitas Prabowo Subianto unggul dalam simulasi Head to Head dengan Ganjar Pranowo dengan selisih hingga 10,4 persen dengan rincian Prabowo 52 persen dan Ganjar 41,6 persen.

Panji Gumilang Resmi Cabut Gugatan Rp5 Triliun ke Mahfud MD

JAKARTA (IM) - Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) menetapkan gugatan pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang terhadap Menko Polhukam Mahfud MD dicabut.

Hal itu berdasarkan sidang penetapan cabutan gugatan yang digelar di Ruang Soebekti 1 PN Jakpus, Senin (31/7).

Diketahui, gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 445/pdt.G/2023/PN.JKT PST. Dijadwalkan sidang akan digelar pada Senin 31 Juli 2023 mendatang.

"Menetapkan, satu, menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. Dua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perdata yang ditetapkan dalam amar

putusan ini," kata Ketua Majelis Hakim Eko Purwanto di lokasi.

Dalam pertimbangannya, Eko menjelaskan permintaan penggugat dikabulkan lantaran hal tersebut diminta sebelum masuk dalam sidang pembacaan surat gugatan.

Merespons hal itu, Deputi III Bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo mengatakan, pihaknya menghormati keputusan tersebut.

"Ya kita kan mengikuti, karena posisi dari Pak Menko Polhukam adalah pihak yang diajukan oleh penggugat sebagai posisi tergugat. Kita ikuti, kalau sidang ini tidak dilanjutkan karena gugatan dicabut, ya kita tentu harus hormati itu," kata Sugeng kepada wartawan, Senin (31/7). **mei**

Kapal Tenggelam di Selat Malaka, 11 Orang Dinyatakan Hilang

PEKANBARU (IM) - Sebuah kapal yang berlayar dari Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara (Sumut) mengalami kecelakaan di Selat Malaka. Sebanyak 11 orang yakni nahkoda dan kru dinyatakan hilang.

Tim SAR Pekanbaru, Riau yang mendapat informasi terkait kecelakaan kapal itu langsung diberangkatkan menuju lokasi. Dari kantor SAR Jarak dari RB 218 ke LKP 84.33 Nm.

Kepala Kantor Basarnas Pekanbaru, Budi Cahyadi mengatakan bahwa pihaknya hari ini mendapatkan informasi kapal tenggelam itu pada pukul 7:40 WIB. Lokasinya masih masuk wilayah Indonesia.

"Lokasi kapal tenggelam itu berada di Zona Ekonomi Eksklusif wilayah Internasional," katanya Senin (31/7).

Dari informasi yang dihimpun kapal bernama KM Lintang Timur Selat tersebut tenggelam karena dihantam ombak.

"Kapal KM Lintang Timur Selatan mengalami karena mengalami kebobrokan akibat terhempas gelombang yang cukup besar di posisi One Fathom Bank," imbuh.

Saat ini tim SAR Pekanbaru yang berada di Dumai masih dalam perjalanan ke lokasi. **mei**



HAKIM RESMI CABUT GUGATAN PANJI GUMILANG KE MAHFUD MD
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo (tengah) bersama Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Desy Meutia Firdaus (kiri) berjabat tangan dengan kuasa hukum Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang usai menjalani sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (31/7). Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menetapkan gugatan pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang terhadap Menko Polhukam Mahfud MD dicabut.

PENGUMUMAN
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini PT. MULTI SARANA EXPRESS suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Utara (Perseroan), mengumumkan akan terjadi pengambilalihan saham, sehingga akan terjadi perubahan pengendalian saham dalam Perseroan.
Bagi para pihak yang berkeberatan atas perubahan saham pengendalian tersebut dapat mengajukan keberatan dalam waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Perseroan dengan alamat Jalan Pluit Raya 5 A/G, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Ttd.
Direksi
PT. MULTI SARANA EXPRESS

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), bersama ini diumumkan bahwa terdapat rencana pengambilalihan saham dalam PT. ABADI AGROSINDO PERSADA ("Perseroan") oleh Pihak lain yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham mayoritas/pengendalian.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPT, bagi kreditor yang memiliki keberatan terkait dengan rencana pengambilalihan sebagaimana disebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:
PT. ABADI AGROSINDO PERSADA
Jl. DR Kusuma Atmaja No. 49
Kel. Menteng, Kec. Menteng,
Jakarta Pusat,
DKI Jakarta - Indonesia
Jakarta, 1 Agustus 2023
Direksi
PT. ABADI AGROSINDO PERSADA

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), bersama ini diumumkan bahwa terdapat rencana pengambilalihan saham dalam PT. PERMATA AGRO PERSADA ("Perseroan") oleh Pihak lain yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham mayoritas/pengendalian.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPT, bagi kreditor yang memiliki keberatan terkait dengan rencana pengambilalihan sebagaimana disebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:
PT. PERMATA AGRO PERSADA
Jl. DR Kusuma Atmaja No. 49
Kel. Menteng, Kec. Menteng,
Jakarta Pusat,
DKI Jakarta - Indonesia
Jakarta, 1 Agustus 2023
Direksi
PT. PERMATA AGRO PERSADA